



Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Analisis Makassar

Sri Wahdayuni Rusman^{1*}, Basri Bado², Muhammad Syafri³, Irwandi⁴, Sri Astuty⁵
¹²³⁴⁵Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*Email: swahdayuni@gmail.com

Doi : <https://doi.org/10.37339/e-bis.v10i1.2995>

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :
2026-01-11
Diperbaiki :
2026-01-17
Disetujui :
2026-01-22

Kata Kunci :

Efektivitas;Kemandirian;
Pendapatan Asli Daerah; Kota
Makassar

Keywords:

*Effectiveness, independence, local
revenue, and Makassar City.*

Alamat Korespondensi

ABSTRAK

Penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efektif dan mandiri guna mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, kinerja keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi pendapatan dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kemandirian keuangan Kota Makassar serta arah perkembangannya selama periode 2015–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Analisis data dilakukan melalui perhitungan rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, serta analisis tren model kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas keuangan daerah berada pada kategori cukup efektif hingga efektif, sementara kemandirian keuangan menunjukkan tren peningkatan meskipun masih berada pada kategori sedang atau partisipatif, dengan arah perkembangan yang positif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy requires local governments to manage finances effectively and independently to support development financing and improve public service quality. Nevertheless, regional financial performance still encounters challenges, including revenue fluctuations and a high dependence on transfer funds from the central government, making continuous evaluation necessary. This study aims to analyze the level of financial effectiveness and financial independence of the Makassar City Government and to examine the direction of its financial development during the 2015–2024 period. The research applies a quantitative approach with a descriptive method, utilizing secondary data in the form of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) realization reports obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Makassar City. Data were analyzed using effectiveness ratios, regional financial independence ratios, and a quadratic trend analysis model. The findings indicate fairly effective performance and increasing independence, remaining within a moderate participatory category.

: Jl. Letnan Jenderal Suprpto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 54311

PENDAHULUAN

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang. Pemerintah Kota Makassar perlu terus memperkuat basis PAD dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun melalui pemanfaatan aset serta pengembangan BUMD. Langkah ini penting agar arah positif yang tergambar dalam hasil tren kuadrat dapat diwujudkan dalam realisasi aktual. Selain itu, target PAD sebaiknya ditetapkan secara realistis dengan memperhatikan potensi riil yang dimiliki daerah, sehingga kesenjangan antara target dan realisasi dapat ditekan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat lebih stabil.

Dari sisi penelitian, kajian mengenai tren kinerja keuangan daerah sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan indikator lain, seperti rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, maupun rasio kontribusi PAD. Dengan cara ini, gambaran yang diperoleh akan lebih komprehensif dalam menjelaskan kondisi keuangan daerah. Penelitian juga dapat diperluas pada daerah lain, baik kota maupun kabupaten, sehingga perbandingan dapat dilakukan untuk melihat variasi tingkat kemandirian dan efektivitas antarwilayah.

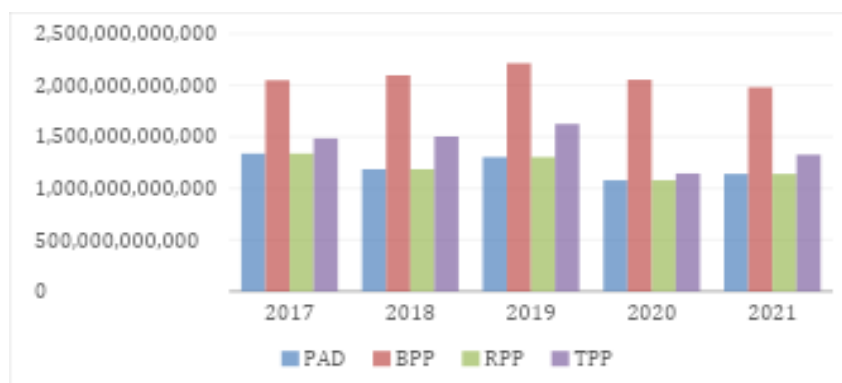
Selain itu, pendekatan tren kuadrat yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran jangka panjang mengenai arah perkembangan kinerja fiskal, namun belum mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya fluktuasi pada capaian aktual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis lain seperti regresi atau model ekonometrika, sehingga variabel-variabel yang memengaruhi perubahan kemandirian dan efektivitas PAD dapat teridentifikasi dengan lebih jelas.

Era reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) merupakan regulasi yang bertujuan memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang ini menata kembali hubungan keuangan pusat dan daerah secara lebih adil, transparan, dan berkelanjutan melalui pengaturan sumber-sumber pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan mekanisme transfer ke daerah. UU HKPD mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perbaikan struktur pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat dikurangi. Selain itu, regulasi ini menekankan peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, reformasi sistem perpajakan daerah, serta penerapan skema transfer berbasis kinerja dan kebutuhan. Dengan demikian, penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kemandirian keuangan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangannya secara mandiri. daerah yang mandiri secara fiskal ditandai oleh kemampuan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam konteks tersebut, efektivitas dan kemandirian keuangan daerah menjadi indikator utama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan otonomi fiskal daerah telah berjalan dengan baik. Efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan sedangkan kemandirian keuangan

menunjukkan kapasitas daerah dalam membiayai pengeluarannya melalui sumber pendapatan sendiri (Hunter, 1977)

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peranan strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa di wilayah Indonesia Timur. Potensi ekonomi yang besar menjadikan Makassar sebagai salah satu daerah dengan kontribusi PAD tertinggi di provinsi tersebut. Pemerintah Kota Makassar secara berkelanjutan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan kemandirian keuangan daerah, antara lain melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah, digitalisasi sistem keuangan daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset milik daerah. Meskipun demikian, kinerja keuangan daerah Kota Makassar masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Perkembangan pendapatan asli daerah kota Makassar
Sumber : Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Makassar (tahun 2024)

Terlihat bahwa nilai Bantuan Pemerintah Pusat (BPP) secara konsisten lebih tinggi dibandingkan PAD selama periode 2017–2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Makassar masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, peningkatan nilai Target Pendapatan (TPP) dan Realisasi Pendapatan (RPP) pada tahun-tahun tertentu menunjukkan adanya potensi peningkatan kemampuan fiskal daerah. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi daerah, namun pada tahun 2021 mulai terlihat tanda-tanda pemulihan fiskal. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Kota Makassar masih perlu ditingkatkan agar mampu menopang pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

Secara konseptual, efektivitas menurut (Chester, 1938) merupakan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, termasuk kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks keuangan daerah, efektivitas mengacu pada sejauh mana pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan mampu mencapai tujuan pembangunan secara efisien dan produktif. Sementara itu, teori kemandirian fiskal yang dikembangkan oleh (Chester, 1938) melalui *Fiscal Autonomy Index* menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran publik dari PAD tanpa ketergantungan signifikan terhadap transfer pemerintah pusat. Kedua teori ini menjadi kerangka dasar untuk menilai kesehatan fiskal dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan hubungan erat antara efektivitas dan kemandirian keuangan daerah. (Antasena, 2023) menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan

keuangan daerah memiliki hubungan positif terhadap efisiensi penggunaan anggaran. (Soviana & Suparno 2021) menemukan bahwa efektivitas yang tinggi berdampak pada meningkatnya kemandirian fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya, (Saragih G, 2022) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi di daerah otonomi baru disebabkan oleh rendahnya efektivitas pengelolaan PAD. Hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa peningkatan efektivitas merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu hanya meneliti efektivitas atau kemandirian keuangan daerah secara terpisah dan belum banyak yang mengkaji keduanya secara simultan dalam konteks jangka panjang. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya kajian komprehensif untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan kemandirian keuangan daerah berkembang secara bersama-sama dari waktu ke waktu, khususnya di daerah perkotaan seperti Kota Makassar yang memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat efektivitas keuangan daerah Kota Makassar; (2) menilai tingkat kemandirian keuangan daerah; dan (3) mengidentifikasi tren perkembangan efektivitas dan kemandirian keuangan daerah selama periode sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan dan model tren kuadrat kecil (least square trend model) guna menggambarkan arah perkembangan kinerja fiskal daerah dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dua kontribusi utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian empiris di bidang ekonomi pembangunan mengenai efektivitas dan kemandirian fiskal dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kemandirian fiskal. Dengan demikian, analisis efektivitas dan kemandirian keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja fiskal, tetapi juga sebagai dasar untuk memperkuat implementasi otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan mandiri.

Penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. (Said & Bakar 2021), (Soviana & Suparno 2021) menemukan bahwa daerah yang mampu merealisasikan PAD sesuai target cenderung memiliki struktur keuangan yang lebih kuat dan ketergantungan yang lebih rendah terhadap dana transfer pusat. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Fafurida & Pratiwi 2017) yang menunjukkan bahwa efektivitas PAD menjadi fondasi penting dalam mendorong kemandirian fiskal daerah secara bertahap. Hasil-hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan adanya tren peningkatan efektivitas dan kemandirian keuangan Kota Makassar selama periode pengamatan.

Di sisi lain, terdapat pula penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil berbeda atau lebih kritis terhadap hubungan antara efektivitas dan kemandirian keuangan daerah. (Prabowo, 2025) serta (Irasriadipura, 2023) menyatakan bahwa efektivitas PAD tidak selalu berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah secara menyeluruh. (Khoirunisa Wahida & Hoirul Uyun, 2023) serta (Agustina et al, 2023) menegaskan bahwa meskipun

efektivitas pemungutan PAD relatif baik, tingkat kemandirian daerah masih rendah akibat dominasi dana transfer pusat dan keterbatasan basis pajak daerah. (Temuan Yuliantoro dan Priyastiwati 2024) juga menunjukkan bahwa efektivitas yang tinggi belum tentu diikuti oleh kemandirian fiskal apabila struktur pendapatan daerah belum seimbang. Perbedaan hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kebijakan, sehingga perlu dikaji secara kontekstual sesuai karakteristik daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas keuangan daerah dipahami sebagai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Bakar dan Said 2021) menyatakan bahwa efektivitas keuangan mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi pendapatan secara optimal melalui perencanaan anggaran yang realistis dan pelaksanaan pemungutan yang konsisten. Semakin besar persentase realisasi PAD dibandingkan dengan target, maka semakin efektif kinerja keuangan daerah tersebut. Pandangan ini menegaskan bahwa efektivitas bukan semata-mata soal besarnya PAD, tetapi juga berkaitan dengan ketepatan perencanaan fiskal.

Penelitian (Soviana & Suparno 2021) menambahkan bahwa efektivitas keuangan daerah dipengaruhi oleh kualitas sistem administrasi pendapatan, kepatuhan wajib pajak, serta kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi terhadap kondisi ekonomi. Daerah yang mampu menjaga efektivitas PAD meskipun menghadapi tekanan ekonomi menunjukkan kapasitas pengelolaan keuangan yang baik. Sementara itu, (Remanta dan Ramadhan 2024) menekankan bahwa efektivitas keuangan perlu dianalisis secara dinamis melalui tren jangka panjang, karena fluktuasi tahunan tidak selalu mencerminkan kinerja fiskal secara keseluruhan. Dengan demikian, efektivitas keuangan daerah dalam penelitian kontemporer dipandang sebagai indikator penting keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan dan menjadi dasar dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.

Selanjutnya, (Mardiasmo, 2016) menjelaskan bahwa efektivitas menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah karena mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu memenuhi target penerimaan tanpa menimbulkan inefisiensi atau beban fiskal yang berlebihan. Efektivitas juga terkait erat dengan prinsip akuntabilitas publik, di mana pencapaian target keuangan menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas keuangan daerah sering dikaitkan dengan kapasitas fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal, bahwa efektivitas merupakan salah satu dimensi utama dalam mengevaluasi kinerja fiskal daerah selain efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Teori Kemandirian Keuangan Daerah

kemandirian keuangan daerah dipahami sebagai kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. (Remanta dan

Ramadhan 2024) serta (Saragih & Nurlinda 2023) menegaskan bahwa peningkatan efektivitas PAD berkontribusi langsung terhadap peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah. Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun efektivitas PAD tergolong baik, tingkat kemandirian daerah belum tentu tinggi apabila porsi dana transfer masih mendominasi struktur pendapatan daerah. Oleh karena itu, efektivitas keuangan perlu diiringi dengan strategi peningkatan kemandirian melalui diversifikasi sumber PAD dan penguatan basis ekonomi daerah agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara berkelanjutan. Menurut (Vebiani, 2022) kemandirian fiskal tidak hanya mencerminkan kapasitas pendapatan, tetapi juga kemampuan manajerial pemerintah daerah dalam menggali, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian tinggi umumnya menunjukkan tata kelola fiskal yang baik, inovasi dalam peningkatan PAD, serta pengurangan ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Dalam kerangka ekonomi pembangunan, kemandirian fiskal menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat memperkuat otonomi daerah dalam perencanaan dan pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan itu, (Digdowiseiso & Kaliwattu 2023) menegaskan bahwa peningkatan kemandirian fiskal berperan signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hubungan antara Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah

Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat. Efektivitas pengelolaan PAD yang tinggi akan meningkatkan kemampuan fiskal daerah dan pada akhirnya memperkuat kemandirian keuangan daerah. Menurut (Santosa, 2020) efektivitas PAD merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat kemandirian fiskal, karena semakin besar realisasi PAD terhadap target, semakin besar pula kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Selain itu, kemandirian fiskal yang baik akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam mengatur kebijakan pembangunan dan pembiayaan publik. Dengan demikian, kedua konsep ini saling memperkuat: efektivitas menjadi fondasi peningkatan kemandirian, sedangkan kemandirian menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Kajian Empiris

Beberapa penelitian terbaru telah membahas efektivitas dan kemandirian keuangan daerah di berbagai wilayah di Indonesia. (Antasena et al, 2023) meneliti efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur dan menemukan bahwa efektivitas memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi keuangan daerah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas dapat mendorong pengelolaan anggaran yang lebih optimal.

Sementara itu, (Soviana & Suparno 2021) menganalisis efektivitas dan kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas yang tinggi diikuti dengan peningkatan kemandirian fiskal. Namun, ketergantungan terhadap dana transfer masih relatif besar sehingga otonomi fiskal belum sepenuhnya terwujud. Penelitian oleh (Handayani, 2024) menemukan bahwa kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pajak daerah dan retribusi. Daerah dengan

inovasi dalam digitalisasi pelayanan pajak cenderung memiliki tingkat efektivitas dan kemandirian fiskal yang lebih baik.

Selain itu, (Mulatsih, 2022) dalam penelitiannya di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan PAD berperan penting dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah. Daerah yang mampu mencapai efektivitas tinggi dalam realisasi pendapatan cenderung memiliki ketergantungan yang lebih rendah terhadap dana pusat.

Hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat asumsi bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan langsung dengan tingkat kemandirian fiskal. Dengan kata lain, peningkatan efektivitas menjadi langkah strategis bagi daerah untuk mencapai kemandirian keuangan secara berkelanjutan.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, di mana penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan variabel penelitian, baik satu variabel maupun lebih, tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data berupa angka atau data kuantitatif yang diolah secara statistik untuk menggambarkan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019) data yang akan di gunakan adalah data sekunder. Data ini akan diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Makassar. Berupa laporan realisasi anggaran tahun 2016 -2024 pemerintah kota Makassar. Populasi adalah keseluruhan unit yang relevan dan yang memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, yang dapat berupa orang, objek, atau fenomena lainnya (Uma Sekaran, 2016). populasi penelitian ini yaitu keuangan daerah kota Makassar. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian, sampel yang di gunakan pada penelitian ini adalah data terkait keuangan kota Makassar dari tahun 2016-2024 sebagai bahan perhitungan penelitian ini.

Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah kota Makassar, maka metode analisis yang di gunakan adalah metode analisis rasio keuangan daerah yang di tunjang dengan data-data kuantitatif yang ada. Berikut rumus yang di gunakan untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Makassar sebagai berikut :

$$RK = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{BPP atau provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Keterangan:

RK : Rasio Kemandirian

BPP : Bantuan Pemerintah Pusat

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli Daerah yang di rencanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim 2007). Cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$RE = \frac{\text{realisasi Penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

RE : Rasio Efektivitas

Berikut adalah acuan untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari empat pola hubungan (Halim,2004) yaitu:

1. Pola hubungan instuktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, karenah daerah di anggap telah mampu melakukan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melakukan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0% – 25%	<i>Intruktif</i>
rendah	25% – 50%	<i>Konsultatif</i>
Sedang	50% – 75%	<i>Partisipatif</i>
Tinggi	75% – 100%	<i>Delegatif</i>

Sumber: Halim (Tahun 2004)

Berikut adalah acuan untuk melihat tingkat rasio efektivitas keuangan daerah yang terdiri dalam lima kriteria yaitu :

Tabel 2. Ukuran Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah

Presentasi kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Dibawah 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 (tahun 1996)

Analisis tren Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan daerah tersebut dalam penelitian ini di gunakan analisis tren kemandirian keuangan daerah menggunakan alat analisis yaitu tren dengan model kuadrat kecil. Tren dengan model kuadrat kecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data pada garis tren. Maka dapat formulasikan sebagai berikut:

$$Y^I = a + bX$$

$$a = \frac{\sum XY}{\sum X^2} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Di mana:

Y^I : Nilai Tren

a : Nilai Konstanta yaitu nilai Y pada saat nilai $X=0$

- b : Nilai kemiringan yaitu tambahan nilai Y, apabila X bertambah satu satuan
n : Jumlah data

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rasio Kemandirian

Tabel 3. Hasil penelitian rasio kemandirian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi Dan Pinjaman (Bpp)	Hasil Rasio Kemandirian $\frac{PAD}{BPP} \times 100\%$	Kemampuan Keuangan/ Pola Hubungan
2015	828.871.892.852	1.326.418.487.000	62%	Sedang/ <i>Partisipatif</i>
2016	971.859.753.605	1.992.747.630.282	49%	Rendah/ <i>konsultatif</i>
2017	1.337.231.094.232	2.047.105.605.669	65%	Sedang/ <i>Partisipatif</i>
2018	1.185.453.010.989	2.098.135.622.513	57%	Sedang/ <i>Partisipatif</i>
2019	1.303.316.337.553	2.212.978.024.448	59%	Sedang/ <i>Partisipatif</i>
2020	1.078.328.561.269	2.053.495.450.619	53%	Sedang/ <i>Partisipatif</i>
2021	1.140.328.483.697	1.979.478.474.976	58%	Sedang/ <i>Partisipatif</i>
2022	1.410.813.774.025	2.167.571.812.217	65%	Sedang/ <i>Partisipatif</i>
2023	1.568.267.701.812	2.448.087.150.383	64%	Sedang/ <i>Partisipatif</i>
2024	1.605.016.943.364	2.565.727.060.604	63%	Sedang/ <i>Partisipatif</i>

Sumber : Data Olah, Excel (tahun 2025)

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Kota Makassar periode 2015–2024 menunjukkan nilai yang berfluktuasi pada kisaran 49% hingga 65%, dengan kategori “Sedang/Partisipatif.” Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal Kota Makassar masih berada pada tingkat ketergantungan moderat terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi.

Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari Rp 828,87 miliar pada 2015 menjadi Rp 1,61 triliun pada 2024, pertumbuhan bantuan pemerintah meningkat lebih cepat, dari Rp 1,33 triliun menjadi Rp 2,57 triliun pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PAD belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan dana transfer, sehingga kemandirian fiskal belum mengalami perbaikan signifikan.

Secara umum, pola “Partisipatif” yang tercermin dalam hubungan keuangan Kota Makassar menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketergantungan yang moderat ini masih dapat diterima selama dana transfer digunakan secara produktif untuk memperkuat kapasitas pendapatan daerah di masa mendatang. Namun, untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih tinggi, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi PAD melalui inovasi kebijakan pajak, efisiensi pengelolaan keuangan, dan diversifikasi sumber pendapatan daerah.

Rasio Efektivitas

Tabel 4. Hasil penelitian rasio Efektivitas

Tahun	Target Pad	Realisasi Pad	Hasil Rasio Efektivitas $\frac{Realisasi\ PAD}{Target\ Pad} \times 100\%$	Kriteria
2015	992.147.612.000	828.871.892.852	84%	Cukup efektif
2016	1.286.067.656.000	971.859.753.605	76%	Kurang efektif

Tahun	Target Pad	Realisasi Pad	Hasil Rasio Eektivitas $\frac{Realisasi\ PAD}{Target\ Pad} \times 100\%$	Kriteria
2017	1.484.865.937.000	1.337.231.094.232	90%	Efektif
2018	1.503.411.219.000	1.185.453.010.989	79%	Kurang efektif
2019	1.624.776.235.586	1.303.316.337.553	80%	Cukup efektif
2020	1.144.166.180.881	1.078.328.561.269	94%	Efektif
2021	1.326.375.011.303	1.140.328.483.697	86%	Cukup efektif
2022	1.715.032.322.000	1.410.813.774.025	82%	Cukup efektif
2023	1.965.695.699.807	1.568.267.701.812	80%	Cukup efektif
2024	2.169.105.947.548	1.605.016.943.364	74%	Kurang efektif

Sumber : Data Olah, Excel (tahun 2025)

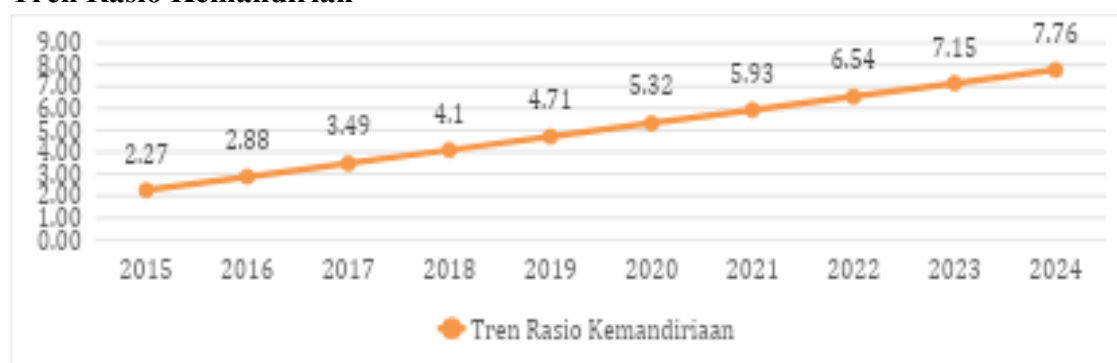
Rasio efektivitas PAD Kota Makassar periode 2015–2024 menunjukkan kinerja berfluktuasi antara 74%–94%, dengan rata-rata berada pada kategori “cukup efektif.” Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah umumnya mampu merealisasikan sebagian besar target pendapatannya, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Efektivitas tertinggi tercapai pada 2020 (94%), mencerminkan keberhasilan strategi pengelolaan PAD di tengah pandemi COVID-19. Sebaliknya, penurunan terendah terjadi pada 2024 (74%), akibat target pendapatan yang terlalu ambisius dan belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan pemungutan.

Tren Model

Analisis tren ini bertujuan untuk mengetahui arah kecenderungan (trend) kinerja keuangan daerah, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau stagnasi, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi terhadap kebijakan fiskal pemerintah kota. Perhitungan ini menggunakan metode tren dengan model kuadrat terkecil (least square trend).

Tren Rasio Kemandirian



Gambar 2. Hasil Tren Rasio Kemandirian

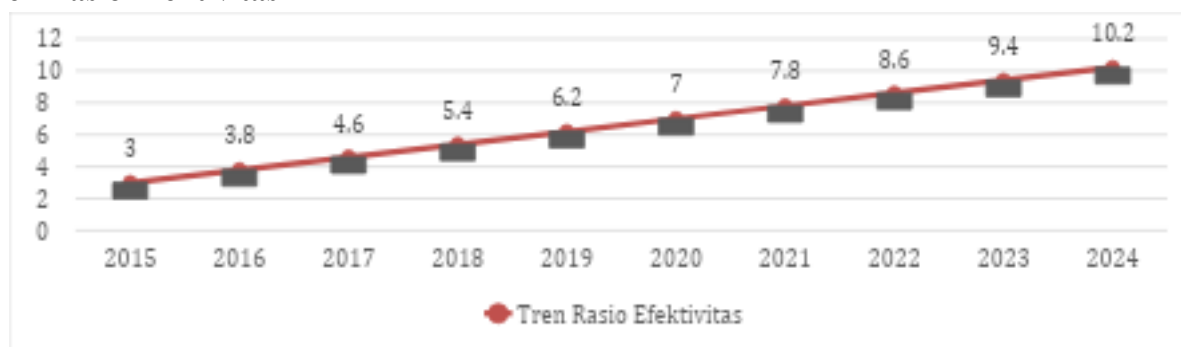
Sumber : Data Olah, Excel (tahun 2025)

Hasil analisis tren model kuadrat menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan Kota Makassar periode 2015–2024 mengalami peningkatan yang konsisten. Nilai tren naik dari 2,27 pada 2015 menjadi 2,88 pada 2016, 3,49 pada 2017, dan 4,10 pada 2018, yang mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam kemampuan fiskal daerah.

Kenaikan berlanjut pada 2019 (4,71) dan 2020 (5,32), menandakan kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah semakin kuat. Pada 2021 (5,93) dan 2022 (6,54), tren menunjukkan pertumbuhan yang stabil, sejalan dengan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Selanjutnya, pada 2023 nilai tren meningkat menjadi 7,15, dan mencapai titik tertinggi pada 2024 sebesar 7,76.

Secara keseluruhan, pola peningkatan yang stabil ini menunjukkan pergeseran positif menuju kemandirian fiskal yang lebih besar, didukung oleh kebijakan intensifikasi PAD dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Namun, meskipun tren terus membaik, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tetap ada, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sumber pendapatan daerah secara mandiri.

Tren Rasio Efektivitas



Gambar 3. Hasil Tren Rasio Efektivitas
Sumber : Data Olah, Excel (tahun 2025)

Hasil analisis tren model kuadrat menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD Kota Makassar periode 2015–2024 meningkat secara stabil dan konsisten. Nilai tren naik dari 3,00 pada 2015 menjadi 4,60 pada 2017 dan 6,20 pada 2019, menandakan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan.

Kinerja terus membaik pada 2020 (7,00) hingga 2022 (8,60), menunjukkan efektivitas pengelolaan PAD yang semakin optimal. Puncaknya terjadi pada 2023 (9,40) dan 2024 (10,20), yang menggambarkan percepatan peningkatan efektivitas sejalan dengan karakteristik model kuadrat.

kinerja keuangan daerah Kota Makassar dalam mengelola PAD mengalami perkembangan positif dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa strategi peningkatan penerimaan daerah berjalan efektif serta mampu memperkuat kemandirian fiskal dari tahun ke tahun.

Pembahasan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kota Makassar periode 2015–2024 mengalami fluktuasi dengan kisaran 49% hingga 65%. Pada 2015 rasio masih cukup tinggi di angka 62%, namun menurun tajam ke 49% pada 2016 akibat lemahnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan fiskal nasional yang terjadi pada tahun tersebut Pemerintah pusat mengeluarkan beberapa regulasi baru, seperti Permendagri No. 23 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD dan PMK No. 216/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi transfer ke daerah, kebijakan pengendalian fiskal ini berdampak pada

keterlambatan penerimaan dana pusat dan memengaruhi arus kas daerah, sehingga kinerja fiskal Makassar menurun dan ketergantungan terhadap dana transfer justru meningkat. Perbaikan terjadi pada 2017 dengan capaian 65%, yang dipengaruhi oleh peningkatan sektor jasa dan perdagangan, serta upaya intensifikasi pajak daerah. Setelah itu, nilai rasio mengalami pasang surut, mencapai titik terendah pada 2020 sebesar 53% karena tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat, dan kembali meningkat ke 65% pada 2022 sebelum turun tipis ke 63% pada 2024.

Sementara itu, hasil tren model kuadrat memperlihatkan pola yang lebih stabil dengan peningkatan konsisten dari 2,27 pada 2015 menjadi 7,76 pada 2024. Pola kuadrat ini menegaskan bahwa secara struktural Kota Makassar memiliki arah pertumbuhan kemandirian fiskal yang positif, meskipun pencapaian aktual masih berfluktuasi.

Hasil ini sejalan dengan teori (Hunter, 1977) tentang Indeks Otonomi Fiskal yang menekankan bahwa kemandirian daerah diukur dari kemampuan PAD membiayai pengeluaran tanpa bergantung besar pada transfer. (Halim, 2004) juga menegaskan bahwa semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Dengan demikian, meskipun capaian aktual Kota Makassar masih pada kategori sedang, tren kuadrat yang meningkat konsisten menunjukkan potensi perbaikan jangka panjang.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian (Puspita et al., 2020) di Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian fiskal kabupaten/kota masih rendah namun mengalami tren peningkatan. Demikian pula, (Said & Bakar 2021) di Kabupaten Mimika menemukan bahwa meskipun kemandirian masih rendah, arah perkembangannya menunjukkan perbaikan. Dengan kata lain, penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menegaskan bahwa kemandirian fiskal di daerah belum tinggi, tetapi menunjukkan tren penguatan.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Makassar

Rasio efektivitas PAD Kota Makassar juga menunjukkan pola fluktuatif. Pada 2015 efektivitas tercatat 84% (cukup efektif), menurun menjadi 76% pada 2016, lalu melonjak ke 90% pada 2017. Nilai tertinggi tercapai pada 2020 dengan 94% (sangat efektif), tetapi setelah itu efektivitas terus melemah hingga hanya 74% pada 2024 (kurang efektif). Fluktuasi ini disebabkan oleh ketidakstabilan antara target PAD yang ditetapkan dengan kemampuan riil dalam merealisasikannya. Ketika target lebih realistis dan strategi intensifikasi berjalan baik, efektivitas meningkat; sebaliknya ketika target terlalu ambisius atau pengawasan lemah, efektivitas menurun.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan (Saragih, 2023) yang menemukan bahwa efektivitas keuangan di beberapa daerah pemekaran masih belum stabil dan cenderung menurun meski ada periode capaian tinggi. Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan studi (Listari et al, 2022) yang menemukan efektivitas pengelolaan keuangan desa mencapai 100% (sangat efektif) secara konsisten. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa efektivitas pada tingkat kota besar seperti Makassar bersifat lebih kompleks, karena sangat dipengaruhi oleh besarnya target PAD, dinamika ekonomi daerah, serta kapasitas administrasi fiskal yang menentukan keberlanjutan kinerja keuangan jangka panjang.

Berbeda dengan capaian aktual, hasil tren model kuadrat pada efektivitas memperlihatkan pola pertumbuhan yang konsisten meningkat dari 3,00 pada 2015 menjadi 10,20 pada 2024. Pola kuadrat ini menunjukkan proyeksi jangka panjang yang positif, di mana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD diperkirakan akan semakin kuat.

Secara teoritis, temuan ini juga sejalan dengan teori (Chester, 1938) mengenai *organizational survival*, yang menegaskan bahwa efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan menjaga keberlanjutan kinerja jangka panjang. Dalam konteks ini, fluktuasi efektivitas PAD Kota Makassar menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan pada periode tertentu, pemerintah daerah mampu beradaptasi dan memperbaiki kinerjanya, sebagaimana tercermin dari tren model kuadrat yang terus meningkat. Dengan demikian, teori Barnard memperkuat pemahaman bahwa efektivitas bukan semata tentang pencapaian target dalam jangka pendek, tetapi tentang kemampuan organisasi (pemerintah daerah) untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan mempertahankan kinerja fiskal yang berkelanjutan.

penelitian ini dalam melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas efektivitas dan kemandirian keuangan daerah secara terpisah dan lebih bersifat deskriptif pada periode tertentu. Selain itu, kajian yang menyoroti arah perkembangan kinerja keuangan daerah dalam jangka panjang, khususnya dengan menggunakan analisis tren, masih terbatas, terutama pada objek penelitian Kota Makassar.

Pembahasan hasil penelitian ini menjawab celah tersebut dengan menunjukkan bahwa meskipun rasio efektivitas dan kemandirian keuangan Kota Makassar mengalami naik turun setiap tahun, arah perkembangannya dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini menegaskan bahwa kinerja keuangan daerah perlu dilihat tidak hanya dari hasil tahunan, tetapi juga dari kecenderungan perkembangannya dari waktu ke waktu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika kinerja keuangan daerah serta memperkuat pemahaman tentang proses menuju kemandirian fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Makassar berada pada kategori sedang dengan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, walaupun ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup besar. Tren model kuadrat yang dihasilkan memperkuat gambaran tersebut dengan menunjukkan arah pertumbuhan yang konsisten dan positif dalam jangka panjang, sehingga potensi peningkatan kemandirian fiskal tetap terbuka apabila optimalisasi PAD dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Sementara itu, efektivitas PAD memperlihatkan pola yang tidak stabil karena pada periode tertentu pengelolaan PAD berjalan efektif, tetapi pada tahun-tahun lain efektivitas menurun akibat target penerimaan yang tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan PAD, konsistensi capaian masih menjadi tantangan. Namun demikian, tren model kuadrat pada efektivitas menunjukkan arah pertumbuhan yang lebih stabil dan optimis, sehingga Kota Makassar memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD di masa mendatang.

Jika dilihat secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Kota Makassar telah menunjukkan usaha dalam memperbaiki kemandirian sekaligus efektivitas fiskalnya. Akan tetapi, pencapaian aktual masih menghadapi kendala dalam menjaga stabilitas dan konsistensi.

Dengan demikian, potensi positif yang tergambar dalam tren kuadrat hanya akan dapat diwujudkan apabila pemerintah daerah mampu mengelola PAD secara lebih optimal, menetapkan target yang realistis, serta memperkuat strategi fiskal yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang. Pemerintah Kota Makassar perlu terus memperkuat basis PAD dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada, baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun melalui pemanfaatan aset serta pengembangan BUMD. Langkah ini penting agar arah positif yang tergambar dalam hasil tren kuadrat dapat diwujudkan dalam realisasi aktual. Selain itu, target PAD sebaiknya ditetapkan secara realistis dengan memperhatikan potensi riil yang dimiliki daerah, sehingga kesenjangan antara target dan realisasi dapat ditekan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat lebih stabil.

Dari sisi penelitian, kajian mengenai tren kinerja keuangan daerah sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan indikator lain, seperti rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, maupun rasio kontribusi PAD. Dengan cara ini, gambaran yang diperoleh akan lebih komprehensif dalam menjelaskan kondisi keuangan daerah. Penelitian juga dapat diperluas pada daerah lain, baik kota maupun kabupaten, sehingga perbandingan dapat dilakukan untuk melihat variasi tingkat kemandirian dan efektivitas antarwilayah. Selain itu, pendekatan tren kuadrat yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran jangka panjang mengenai arah perkembangan kinerja fiskal, namun belum mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya fluktuasi pada capaian aktual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis lain seperti regresi atau model ekonometrika, sehingga variabel-variabel yang memengaruhi perubahan kemandirian dan efektivitas PAD dapat teridentifikasi dengan lebih jelas.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian dan efektivitas keuangan daerah di Kota Makassar saling berkaitan. Ketika efektivitas PAD rendah, kemandirian juga sulit meningkat karena kontribusi PAD terhadap total penerimaan melemah. Sebaliknya, ketika efektivitas tinggi, kemandirian cenderung ikut membaik.

Hasil tren kuadrat yang konsisten meningkat pada kedua indikator memberikan gambaran optimis bahwa dalam jangka panjang Kota Makassar memiliki potensi memperkuat kapasitas fiskalnya. Namun, fluktuasi pada hasil aktual menandakan bahwa realisasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, kondisi perekonomian, serta kualitas pengelolaan PAD.

Secara teoritis, penelitian ini mendukung konsep (Mardiasmo, 2000) yang menyatakan bahwa efektivitas dan kemandirian merupakan dua dimensi penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara empiris, penelitian ini sejalan dengan sejumlah studi sebelumnya (Akhmad et al., 2020); (Said & Bakar, 2021); (Saragih G M, 2022) yang menunjukkan pola peningkatan jangka panjang meskipun capaian aktual masih berfluktuasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kota Makassar memiliki arah fiskal yang positif. Agar proyeksi tren kuadrat dapat terwujud dalam realisasi aktual, pemerintah daerah perlu meningkatkan diversifikasi PAD melalui pengembangan BUMD, memperkuat basis pajak daerah, memanfaatkan aset secara produktif, dan menetapkan target PAD yang realistis berbasis potensi riil.

REFERENSI

- Agustina, F., Putri, R. A., & Hidayat, M. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kemandirian keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Negara*, 9(2), 145–158.
- Akhmad, A., Romadhoni, B., & Diana, F. (2020). Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. *Patria Artha Journal Of Accounting & Financial Reporting*, 4(1), 1–12.
- Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 51–70.
- Chester, B. (1938). The functions of the executive. *Harvard University Presse, Cambridge*.
- Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 219–228.
- Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central Java. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9, 199–209.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, F. (2024). Efektivitas penerimaan pajak daerah (Skripsi). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7320/>
- Hunter, J. S. H. (1977). *Federalism and fiscal balance: a comparative study*.
- Irasriadipura, R., Nugraha, A., & Sari, D. P. (2023). Pengaruh desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan*, 14(2), 101–115.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111549/permendagri-no-23-tahun-2016>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/216~PMK.05~2016Per.htm>
- Khoirunisa Wahida, & Hoirul Uyun. (2023). Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(2), 14–26. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.291>
- Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129–140.
- Mahmudi, M., & Sallama, N. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik: Konsep, pengukuran, dan penerapannya di lingkungan pemerintah daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mulatsih, M. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah terhadap PAD. *Jurnal MEA*, 5(1), 1–10. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2678>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55112>

- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55115>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45228>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45229>
- Prabowo, O., Darmawati, D., & Nirwana, N. (2025). Pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(5 SE-Articles), 2327–2337. <https://doi.org/10.60036/jbm.776>
- Puspita, Y., Tarmizi, R., Solikin, A., Ertiy, I., Rufaida, R., Kartika, M., Rachmadi, R., Maulidizen, A., Meike, I., Siti, A., Mustamin, W., Rego, E. B., Johari, D., Soleh, O., & Taqwiem, A. (2020). *MAKROEKONOMI ISLAM & PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*.
- Said, S. W., & Bakar, A. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(2), 1–20.
- Santoso, R., Nugroho, A., & Rahmawati, D. (2020). Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 101–112. Retrieved from <https://ejournal.kemenkeu.go.id/index.php/jiek/article/view/1879>
- Saragih G M. (2022). *Peranan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Pengadilan Bersih dalam Sistem Peradilan di Indonesia*.
- Saragih, R., & Nurlinda, N. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 6(2), 1–11.
- Sekaran, U. (2006). *Research methods for business: A skill-building approach* (Edisi ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Soviana, A., & Suparno, S. (2021). *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Syiah Kuala University.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.
- Syahrudin, S., Said, S., & Fuada, N. (2025). Analisis efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan keuangan daerah Kota Makassar. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Publik*, 7(1), 1–15.
- Uma Sekaran, R. B. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. In *Leadership & Organization Development Journal* (Vol. 3). <https://doi.org/10.1108/lodj-06-2013-0079>
- Vebiani, D., Nugraha, N., & Hardiana, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(2), 113–126.
- Yuliantoro, R., & Priyastiwati. (2024). Analisis efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 10(1), 44–58.